



Australian Government

Data Terpadu Pastikan Tak Ada Warga Tersisihkan



Berkat kelengkapan dokumen kependudukan, sebanyak 113 warga miskin Desa Ambulu yang terdampak COVID-19 dapat menerima BLT-Dana Desa.

Daftar penerima bantuan sosial yang belum tervalidasi seringkali menyisihkan warga yang berhak di Desa Ambulu, Bondowoso, Jawa Timur. Perangkat desa, Pemerintah Kabupaten Bondowoso, dan KOMPAK berkolaborasi untuk melakukan verifikasi, validasi, dan pepadanan data kependudukan dengan data bantuan pemerintah pusat. Kini, pembagian bantuan pemerintah dan rencana pembangunan menjadi lebih inklusif dan tepat sasaran berkat data yang akurat dan terkoneksi dengan berbagai data kependudukan.

Gelombang pandemi COVID-19 turut hingga wilayah tempat tinggal Satriya Bu Sumito di Dusun Laok, Desa Ambulu, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Seperti kebanyakan warga Desa Ambulu, cucu Satriya yang bernama Mulyadi harus kehilangan pekerjaan sebagai tukang bangunan di Bali akibat melesunya pariwisata. Padahal Mulyadi selama ini menjadi tulang punggung bagi istri, kedua anaknya, serta Satriya. Akibatnya, keluarga mereka hanya bergantung dari penghasilan Satriya dan menantunya Suryati (32) membuat keranjang bambu atau besek untuk ikan. Sayangnya, harga besek ikan yang sebelumnya bisa mencapai Rp20.000 per besek anjlok menjadi Rp10.000 per besek di awal masa pandemi.

Dampak masa pandemi ini memang paling terasa dalam usaha kecil seperti yang dijalankan keluarga Satriya. Untuk membantu perekonomian nasional dan menjaga daya beli, pemerintah pusat kemudian meluncurkan program-program bantuan, seperti program bantuan tunai, bantuan sembako dan lain-lain.

Keluarga Satriya sebenarnya berhak menerima bantuan tersebut. Namun mereka tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang merupakan syarat identitas hukum agar dapat didata sebagai penerima manfaat.

Mendengar hal tersebut, Fasilitator Adminduk di Desa Ambulu, Didik Pranoto (32) segera menemui Satriya. Perempuan yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal ini sempat merasa enggan untuk mengurus KTP. "Buat apa punya KTP? Saya sudah tua *nggak* butuh KTP," tukasnya ketika berulang kali didatangi Didik dan para perangkat Desa Ambulu.

Didik Pranoto akhirnya berhasil meyakinkan Satriya dan membantu mengurus dokumen kependudukannya, sehingga Satriya dapat memiliki KTP dan masuk daftar penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Untuk pertama kalinya Satriya dapat menerima bantuan dari pemerintah di usia 83 tahun. "Kenapa saya (bisa) dapat?" ujarnya seolah tak percaya ketika Didik

mengumumkannya terdata sebagai penerima bantuan.

Satriya adalah satu dari 121 keluarga yang menerima BLT Dana Desa di Desa Ambulu di tahun 2020, yaitu sebesar Rp600.000 untuk tiga bulan pertama dan Rp300.000 untuk enam bulan berikutnya. Ini adalah keputusan pemerintah desa yang tepat sasaran, yang dimungkinkan oleh saling koneksinya data antara SAID (Sistem Administrasi dan Informasi Desa), data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) Kabupaten Bondowoso, dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DTKS menjadi acuan daftar penerima bantuan dari

Fitur layanan Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa (LABKD) online dan pepadanan data kependudukan dengan DTKS di SAID mulai diperkenalkan di Kabupaten Bondowoso Agustus 2019. Peningkatan ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso dengan dukungan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK), satu program kemitraan Pemerintah Indonesia dan Australia. ■

pemerintah pusat seperti PKH (Program Keluarga Harapan) serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

SAID merupakan sistem pengelolaan data dan informasi oleh pemerintah desa. Di dalam SAID, perangkat desa seperti Didik dapat langsung mengakses data desa seperti profil, keuangan dan kegiatan pembangunan desa; data kependudukan; pemerintahan umum; kegiatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

Fitur layanan Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa (LABKD) *online* dan pepadanan data kependudukan dengan DTKS di SAID mulai diperkenalkan di Kabupaten Bondowoso Agustus 2019. Peningkatan ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso dengan dukungan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK), satu program kemitraan Pemerintah Indonesia dan Australia.

Pada awal Desember 2019, Kepala Desa Ambulu Ahmad Hainur meminta Didik untuk mengikuti pelatihan menggunakan fitur layanan *adminduk online* melalui SAID. Kegiatan tersebut adalah untuk mempersiapkan perangkat desa agar dapat mengoperasikannya.

Pemerintah Desa Ambulu awalnya selalu mengalami kesulitan untuk memastikan

penyaluran bantuan sosial, terutama yang berasal dari pemerintah pusat, agar tepat sasaran. "Pemerintah Desa Ambulu sering menemukan orang yang menemukan bantuan ganda, orang yang sudah meninggal masih tercatat sebagai penerima bantuan, atau orang miskin yang justru tidak terdata sebagai penerima bantuan," ujar Didik, yang sejak tahun 2017 menjabat sebagai Kepala Seksi Pembangunan, dan sekarang Seksi Kesejahteraan Desa Ambulu. Hal ini tentu saja meresahkan Didik yang tugasnya mengawal program-program di desa Ambulu agar berjalan dengan baik dan benar-benar meningkatkan kesejahteraan warga.

Didik menemukan bahwa masalah pepadanan data menjadi sangat mudah dan cepat dilakukan karena baik data kependudukan dan DTKS dapat diakses melalui SAID.

"Dari proses pepadanan data ini akan ditemukan penduduk tanpa NIK, NIK ganda, nama ganda, mati, pindah dan datang, sehingga pemutakhiran data lain seperti DTKS akan menjadi lebih akurat," jelas Didik.

SAID juga dapat digunakan untuk mendata dan melakukan verifikasi-validasi daftar penerima bantuan BLT-Dana Desa. "Dengan terhubungannya sistem informasi desa dengan DTKS, perangkat desa dapat dengan mudah melihat warganya yang sudah menerima PKH dan BPNT," tutur

lulusan Jurusan Administrasi Negara Universitas Bondowoso ini.

Tidak hanya berhenti pada verifikasi data, fitur layanan Adminduk daring juga membantu menyelesaikan ketidaklengkapan maupun ketidaksesuaian dokumen yang ditemukan saat pepadanan data. "Dulu, untuk mengurus satu dokumen kependudukan di Dinas Dukcapil Bondowoso, warga desa harus menempuh perjalanan dengan menggunakan angkutan umum selama satu jam yang memakan biaya sekitar Rp40.000," tutur Ahmad. Pengurusan dokumen dulu juga tidak dapat selesai dalam satu hari sehingga minimal mereka harus pergi dua kali ke Kota Bondowoso.

Namun berkat layanan Adminduk daring ini, warga hanya perlu menyampaikan berkas persyaratan pembuatan dokumen kependudukan lewat

perangkat desa tanpa biaya sepeserpun. Pencetakan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran pun dapat dilakukan di kantor desa.

Sekembalinya dari pelatihan, Didik beserta seluruh perangkat desa termasuk kepala desa, kepala dusun, RW dan RT segera memulai sosialisasi layanan Adminduk daring dan membantu warga melakukan pengurusan Adminduk di ruangan khusus layanan yang disediakan di kantor desa sejak awal 2020. Ia juga selalu menyempatkan diri bertanya tentang kelengkapan dokumen adminduk warga, bahkan memfasilitasi langsung lewat SAID versi *mobile*, dalam setiap kesempatan blusukan sebagai perangkat desa.

"Tetapi sosialisasi yang paling kuat justru dilakukan oleh warga yang telah merasakan sendiri kemudahan layanan adminduk *online*, atau



▲ SAID memiliki fitur adminduk daring yang memudahkan proses pengurusan dokumen kependudukan.

model getok tular, sehingga meruntuhkan kesan mengurus adminduk itu sulit, lama dan mahal,” ujar Didik.

Ketersambungan data kependudukan dan DTKS di SAID inilah yang memungkinkan Didik membantu Satriya dan warga lain yang belum terdaftar di dalamnya. Segera setelah pandemi melanda di bulan April 2020, Didik melakukan pendataan calon penerima bantuan BLT-Dana Desa. Ia kemudian memadankan data tersebut dengan data kependudukan di SAID. Ketika itulah Didik menemukan bahwa 39 warga belum terdaftar di DTKS. Selain itu, empat warga termasuk Satriya bahkan belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Otomatis, warga yang belum memiliki NIK tidak dapat diajukan sebagai penerima bantuan.

Dengan lengkapnya dokumen kependudukan, Didik segera memutakhirkan DTKS dengan menambahkan data warga yang belum terdaftar lewat fitur pemadanan data DTKS dalam SAID. Ibu Satriya kemudian juga dicatatkan sebagai calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-Dana Desa; bantuan yang diberikan pada masyarakat rentan yang terdampak pandemi namun belum terdaftar sebagai penerima bantuan sosial PKH dan BPNT.

Sekarang 100% warga Desa Ambulu kini sudah memiliki NIK. Didik menargetkan penuntasan perekaman KTP bagi mereka yang belum memiliki KTP serta mendorong warga mengurus Kartu Identitas Anak (KIA).

Dengan semakin akuratnya data kependudukan desa yang terkoneksi dengan berbagai data pemerintahan lainnya, pemerintah desa dapat menyusun program pembangunan yang inklusif. Hal ini juga mendukung pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM) sehingga dapat melayani masyarakat yang membutuhkan.

Perkembangan serupa dapat ditemukan di seluruh 209 desa di Kabupaten Bondowoso yang telah mengembangkan dan memanfaatkan SAID. Didik pun aktif melatih desa-desa di luar Kecamatan Cerme dan Wringin untuk memperluas layanan adminduk daring.

Dengan semakin akuratnya data kependudukan desa yang terkoneksi dengan berbagai data pemerintahan lainnya, pemerintah desa dapat menyusun program pembangunan yang inklusif. Hal ini juga mendukung pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM) sehingga dapat melayani masyarakat yang membutuhkan, seperti Satriya Bu Sumito.



▲ Layanan adminduk menggunakan SAID mobile, memudahkan fasilitator adminduk desa mendata dan melayani masyarakat Desa Ambulu.